



Peran Pemerintah dalam Program Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan

The Government's Role in the Wonosari Village Development Program Tuter District, Pasuruan Regency

Muhammad Reza Hardianto*, Isnaini Rodiyah

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

This study aims to describe the role of government in building of Wonosari village, Tuter sub district, Pasuruan regency and how the implementation program of the building of Wonosari village. This study uses qualitative descriptive. The informants of this study are head of department, head of compiling program, head and members of local government, BPD and societies. Collecting data technique doing by triangulation, inductive data analysis, and the result of the qualitative study emphasize to the good meaning of the study. this study showed that the role of government in building of Wonosari village is good enough and balance. The cooperation is mutual where the involved knowing each the position and role in build the village. The local government has role to facilitate the societies and give good guidance about the purpose of the building. People play the role in giving the ideas, energy and wealth to the success of build. Whereas, the support factor is cooperation of government – society is the approach of government to the society. And the society has understood about their position and their role in study. In addition to, the inhibit factor is minimal awareness of society to the program and there is still opinion from the government that society is the object of supervision build.

Keywords: Role Of Government, Build, Development

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah dalam pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan serta bagaimana pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wonosari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini mulai Kepala Dinas, Kabid Penyusunan Program, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, hingga masyarakat umum. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas makna penelitian yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan Desa Wonosari cukup baik dan seimbang. Kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam

OPEN ACCESS

ISSN 2527-9246 (online)

ISSN 2334-445x (print)

*Correspondence:

Muhammad Reza Hardianto
kecoapanggang@gmail.com

Citation:

Hardianto MR and Rodiyah I (2018)
Peran Pemerintah dalam Program Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.
Peran Pemerintah dalam Program Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan [The Government's Role in the Wonosari Village Development Program Tuter District, Pasuruan Regency]. 6:1.
doi: 10.21070/jkmp.v4i2.689

pembangunan desa. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan. Sedangkan, faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat, dan masyarakat sendiri telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Selain itu, faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran masyarakat pada program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah serta masih adanya anggapan dari pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

Keywords: Role Of Government, Build, Development

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional dimulai dalam pembangunan daerah serta gerak pembangunan desa. Akan tetapi pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa masalah pokok pembangunan seperti tidak seimbangny pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Permasalahan pembangunan terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan desa mempunyai target peran yang sangat strategis dalam upaya Pembangunan Nasional maupun Pembangunan di Daerah, karena terkandung unsur-unsur pemerataan pembangunan beserta hasilnya, dan menyentuh langsung kepentingan-kepentingan masyarakat yang bermukim di desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Solekhan (2012) bahwa hakikat keberadaan pemerintahan dan birokrasi adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Desa merupakan wilayah yang menyita perhatian banyak pihak, berbagai problem bisa dikaji dan mendesak untuk diselesaikan. Kekuatan ekonomi desa selalu berada pada ketidakberdayaan dan ketidakseimbangan. Desa umumnya menghadapi ancaman keterbelakangan dan ketidakadilan dalam pembangunan. Secara alamiah ada semacam dilema, yaitu kemiskinan dan pengetahuan yang rendah menyebabkan pemanfaatan yang kelewat batas atas sumber daya alam untuk bertahan hidup, akan tetapi disisi lain banyak sumber daya yang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal seperti sinar matahari, air, angin, tanaman, ikan, ternak dan tenaga manusia Daldjoeni and Suyitno (2004) . Hal senada diungkapkan oleh Rustadi, bahwa di sektor masyarakat tradisional banyak sekali sumber daya alam yang belum dikembangkan secara optimal disebabkan karena masih terbelakangnya masyarakat tersebut, kekurangan modal, sehingga tingkat produktivitas rendah dan berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang rendah Rustiadi et al. (2009) . Keterbatasan pengetahuan dan modal menjadi faktor yang menghambat pembangunan desa.

Walaupun pembangunan terhadap desa sudah cukup lama akan tetapi sampai saat ini masih terdapat persoalan yang dihadapi desa dan membutuhkan penyelesaian segera. Program-program yang ada lebih menunjukkan kebijakan pemerintah yang top-down, karena

kebanyakan konsepnya lahir dari konsepsi pejabat atau pihak di luar desa, mengabaikan konteks lokal desa dan pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan pemerintah semata (Eko, 2004). Sehingga yang terjadi bukanlah tumbuhnya kemandirian dan daya saing desa, akan tetapi ketergantungan dan pragmatisme desa terhadap program pemerintah, desa juga hanya menjadi arena perebutan dukungan politik.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang utuh, maka dibutuhkan berbagai upaya serius salah satunya dengan menemukan formula paradigma pembangunan yang tepat. Berbagai perubahan paradigma pembangunan pun terjadi. Dari paradigma *production centered development* yang lebih menekankan adanya perubahan-perubahan fisik dan pencapaian kebutuhan dasar tanpa peduli apakah pencapaian tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak, hingga paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat (*people oriented development*) yang menuntut adanya kerja sama dan keseimbangan peran yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Jika hanya dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, Kemampuan masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk memenuhi kebutuhan dasar relatif baik. Pembangunan fisik Kabupaten Pasuruan cukup berkembang. Demikian pula pembangunan di Desa Wonosari. Sarana prasarana Desa cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas umum mulai dari pasar desa, posyandu, puskesmas, 3 unit sekolah tingkat dasar, 2 unit sekolah tingkat menengah pertama, 2 unit sekolah tingkat menengah atas, ponten umum, hippam (Monografi Desa Wonosari, 2014).

Namun, sebagaimana penjelasan di awal, berbagai kelengkapan fasilitas dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, belum cukup untuk menilai bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Wonosari telah tercapai. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan program pembangunan di Desa Wonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan serta bagaimanakah peran pemerintah Dalam Program Pembangunan Desa Wonosari. Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wonosari serta peran pemerintah dalam program pembangunan Desa Wonosari.

Pengertian peran menurut Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan Menurut Moelyono (1949), peran merupakan sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Dalam pendapat lain mengenai peran, menurut Henslin (2007) mendefinisikan peran (*role*) sebagai perilaku, kewajiban dan hak yang melekat pada suatu status. Sedangkan Thoha (1997) mengklasifikasikan peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat; 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncul apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Menurut Parson Supriatna (1996), Birokrasi merupakan alat unsur yang terbaik untuk mencapai tujuan Negara sejahtera yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Sedangkan menurut Siagian (2003). Apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional maka pemerintah memiliki beberapa fungsi – fungsi tertentu : a) Pemerintah selaku

stabilisator, baik dalam menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi, maupun stabilitas sosial budaya; b) Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah: inovasi konseptual dalam ide-ide mengenai pembangunan; serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja; c) Pemerintah sebagai motivator handal dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Pendapat Korten and Sjahrir (1988) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Sedangkan Menurut Gettinger Bryant and White (1987) mengatakan sebagai berikut : Bahwa proyek-proyek merupakan sisi tajam pembangunan. Dengan demikian benar bahwa proyek harus erat kaitannya dengan program-program (nasional atau daerah).

Menurut Tjokrowinoto (1987) yakni : Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri sering kali samar-samar dan kabur. Sedangkan menurut Kartasasmita (2001) mengatakan sebagai sesuatu yang baru dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat tidak luput dari berbagai anggapan, seperti : 1) Bahwa pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan di tingkat bawah yang lebih memerlukan bantuan material dari pada keterampilan teknis dan manajerial. Akibatnya sering terjadi pemborosan sumber daya dan dana karena kurang persiapan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia; 2) Anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan jauh lebih ampuh dari pada teknologi masyarakat itu sendiri.

Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang bahkan menghambat proses pembangunan. Akibatnya lembaga-lembaga tersebut kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.

Menurut Muljana (2001) pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sedangkan menurut Barbara Nelson dalam Winarno (2007) menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah - masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Dengan memilih lokasi penelitian di Desa Wonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, fokus penelitian ini adalah peran pemerintah dan pelaksanaan dalam program pembangunan desa. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, di Desa Wonosari menunjukkan bahwa pembangunan di desa tersebut cukup baik. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Hadari, 2007: 157).

Dari teknik tersebut, didapat beberapa informan mulai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabid Penyusunan Program, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, hingga masyarakat umum. Untuk mendapat data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara informan, hingga dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data (pemilihan dan pengelompokan data), penyajian data (membandingkan data di lapangan dengan teori), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pembangunan Desa Wonosari cukup baik. Dari pembangunan fisik hingga non-fisik hampir semua terlaksana. Pembangunan fisik Desa Wonosari lebih ditekankan pada program pembangunan Desa Wisata, BUMDes Mart, hingga pavingisasi. Sedangkan pembangunan non-fisik lebih ditekankan pada pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

[Table 1 about here.]

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber dana pembangunan desa tidak hanya berasal dari pemerintah, namun juga dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mempunyai inisiatif untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Desa Wonosari dalam wawancara pada tanggal 25 April 2017, bahwa masyarakat Desa Wonosari telah cukup mempunyai inisiatif untuk merancang, melaksanakan, hingga mengawasi sendiri proses pembangunan yang hasilnya nanti untuk dinikmati bersama.

Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Desa Wonosari

Program pembangunan Desa Wonosari ini telah memberikan perubahan yang sangat baik kepada masyarakat karena jenis program pembangunan fisik desa yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat bisa dilihat dengan kasat mata karena ini merupakan tujuan utama dari Pemerintah Desa untuk memodernisasi dalam rangka mewujudkan pembinaan masyarakat yang berdaya dan mandiri bukti nyata dalam pelaksanaan program pembangunan desa seperti terbangun bangunan fisik desa yang berupa HIPPAM, paving jalan dusun, koperasi, pasar desa.

Dari temuan peneliti yang ditemui jika dikaitkan dengan teori peran telah sesuai berdasarkan pendapat menurut Siagian [Ulumiyah et al. \(2015\)](#) yang memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang sederhana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan adanya jenis program pembangunan fisik desa ini juga diharapkan, untuk mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk memajukan Desa Wonosari.

Pada dasarnya alasan memilih program pembangunan fisik desa dapat dilihat sebagai bentuk dari wujud nyata pembangunan fisik Desa Wonosari, yang menggambarkan bahwa desa tersebut sudah menjalankan program yang sudah di amanatkan oleh pemerintah daerah dan menjadi alasan keberhasilan suatu program yang sudah di jalankan oleh pemerintah daerah dengan kucuran dana yang sangat besar. Hal ini sebagai motor penggerak pembangunan fisik yang dijalankan di Desa Wonosari untuk memenuhi potensi desa dan masyarakatnya dalam hal membiayai pembangunan fisik desa yang menyeluruh serta pemberdayaan masyarakatnya, sehingga hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Selanjutnya, pelaksanaan dari program pembangunan desa mendapat apresiasi dari masyarakat yang diberikan dalam program pembangunan Desa Wonosari dapat dilihat bahwa, sesuatu yang diberikan masyarakat sangat positif dengan cara bergotong royong melaksanakan program pembangunan desa tanpa meminta imbalan sepeserpun masyarakat membantu kemajuan desanya, dan fokus pembangunan untuk tahun ini menuju kearah pengembangan desa wisata yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi alam dan manusia yang ada di Desa Wonosari yang mana fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori pembangunan desa telah sesuai dengan pendapat menurut [Adisasmita \(2013\)](#) yang mengatakan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program yang dilaksanakan di daerahnya. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain, mereka bersedia menyerahkan sebagian lahan yang dilewati oleh pembangunan jalan desa atau jaringan irigasi, tanpa meminta pembayaran ganti

rugi harga lahan tersebut.

Bagaimanapun keadaan yang sudah di tata rapi oleh Pemerintah Desa Wonosari masih ada permasalahan yang muncul ketika Pemerintah Desa Wonosari sudah banyak melakukan pelaksanaan pembangunan fisik desa masih terdapat hal yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wonosari seperti memperbaiki gedung kesenian serta mengembangkan seni-seni tarian khas Desa Wonosari dan pembangunan BUMDes Mart yang pendanaannya akan diambil dari Dana Desa (DD) untuk memenuhi kebutuhan dari semua masyarakat desa maupun masyarakat di luar desa untuk membeli peralatan pertanian, dan kebutuhan pokok dengan memberikan harga yang terjangkau bagi petani dan warga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari serta masih ada sebagian masyarakat yang masih kurang mendukung dan mengerti akan program pembangunan desa hal ini yang menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Wonosari.

Fenomena yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan teori administrasi pembangunan telah sesuai dengan pendapat Tikson Fauzi (2013) mengatakan bahwa pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara disengaja dengan strategi serta kebijakan menuju arah yang ingin dicapai. Maka mentransformasi dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya untuk menuju arah yang lebih baik sehingga dapat lebih mensejahterakan masyarakat Desa Wonosari.

Peran Pemerintah dalam program pembangunan desa

Menurut Siagian (2003) apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional maka pemerintah memiliki peran sebagai berikut Pemerintah selaku stabilisator, baik dalam menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi, maupun stabilitas sosial budaya, Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah: inovasi konsepsionil dalam ide-ide mengenai pembangunan; serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja, Pemerintah sebagai motivator handal dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah akan dijelaskan ke dalam tiga bagian mulai dari pemerintah sebagai Stabilisator, Inovator, dan Motivator.

Pemerintah sebagai stabilisator

Pemerintah melakukan peran pelaksanaan program pembangunan Desa Wonosari telah bekerja sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yang mana mempunyai tugas dan fungsinya yakni dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Pasuruan serta perundang – undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. Dalam memberikan program pembangunan Desa Wonosari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berperan dalam pelaksanaan stabilisator.

Hasil peran yang dilakukan oleh pemerintah di atas sesuai dengan ciri-ciri teori peran menurut Dougherty & Pritchard (Bauer, 2003), yang menyatakan teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi, menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari tindakan. Dengan adanya peran dari pemerintah ini, merupakan hal utama sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan pelayanan terhadap masyarakat dengan bentuk produk berupa pembuatan program pembangunan desa, hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya suatu program maka suatu permasalahan dapat teratasi dengan baik sebagai *problem solving*.

Peran stabilisator ini dapat dilihat mulai dalam perumusan atau pembuatan program-program yang melihat dan memprioritaskan hal yang mendesak dan sesuai dari kebutuhan dan potensi masyarakat Desa Wonosari. Dengan proses penyampaian dengan cara sosialisasi program-program, rapat koordinasi, serta bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat-perangkat desa dan tidak lupa pemerintah juga memfasilitasi aspirasi politik dalam hal program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan DPRD, Peran pemerintah ini merupakan bentuk stabilisator program sesuai dengan pendapat menurut Siagian (2003) Pemerintah selaku stabilisator (orang, alat, dan sebagainya yang membuat stabil), baik dalam menjaga sta-

bilitas politik, stabilitas ekonomi, maupun stabilitas sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta pertahanannya labil. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif.

Pemerintah sebagai inovator

Selanjutnya dalam peran program pembangunan Desa Wonosari, pembuatan inovasi-inovasi program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakat Desa Wonosari sangat penting dilakukan oleh pemerintah karena dari inovasi program yang akan di laksanakan di masyarakat haruslah mampu mencakup apa yang diinginkan oleh semua masyarakat, hal ini yang dapat membantu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dari setiap lingkup masyarakat di Desa Wonosari dengan juga mempertimbangkan potensi yang paling menonjol di wilayah Desa Wonosari. Bentuk program inovasi unggulan tersebut yang di prioritaskan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya Manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pameran-pameran dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa Wonosari, Program pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja, Program penunjang pasar desa, Pengembangan pembangunan partisipatif, Peningkatan infrastruktur desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan Program penerapan modul aplikasi pengelolaan keuangan desa.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori inovasi menurut Siagian (2003) Pemerintah sebagai inovator (orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang baru), baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah: inovasi konsepsional dalam ide – ide mengenai pembangunan; serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja. Pemerintah memiliki peran salah satunya selaku inovator. Inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (teman, metode, sistem, cara berpikir).

Pemerintah sebagai motivator

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan peran yang dilaksanakan oleh pemerintah, masih dapat ditemui kendala – kendala dalam melaksanakan tugasnya. Maka diperlukan peran motivasi dari pemerintah untuk mengubah hambatan yang masih terjadi di lingkungan masyarakat Desa Wonosari, hal ini dimaksudkan untuk mengubah masyarakat seperti keberagaman dari perilaku masyarakat yang masih dikatakan kurang paham akan yang sudah di terapkan oleh pemerintah, kemampuan pola pikir masyarakat yang masih tradisional, kurangnya kesadaran untuk memajukan desanya sendiri, masih belum terpenuhinya sasaran yang tepat melalui pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dalam artian desa masih memiliki kepentingan-kepentingan pribadi sehingga membuat pemerintah belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Sehingga masih ada desa yang masih tertinggal pembangunannya dan kurang kesejahteraannya serta pemberdayaan yang masih belum merata, karena untuk menyelesaikan 1 (satu) kasus membutuhkan waktu yang lama dalam program pembangunan desa.

Fenomena di atas apabila dikaitkan dengan teori motivasi Abraham H. Maslow dalam *leadership* (2012) yang mengemukakan pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hirarki kebutuhan, yaitu : kebutuhan fisiologikal (*physiological needs*), seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan hubungan seksual; kebutuhan rasa aman (*safety needs*), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; kebutuhan akan kasih sayang (*love needs*), kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan aktualisasi diri (*self actualization*). Teori motivasi ini mempertegas dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan program pembangunan desa, pembangunan desa yang ada di Desa Wonosari sudah bisa dikatakan baik dengan terbangunnya bangunan fisik desa yang berupa HIPAM, paving jalan dusun, koperasi, pasar desa yang dari beberapa jenis bangunan fisik desa ini dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Wonosari. Hal ini bisa dikatakan sudah sesuai dengan tugas dari Pemerintah Desa, dan fokus pembangunan untuk tahun ini menuju ke arah pengembangan desa wisata. Apresiasi yang disampaikan masyarakat sangat positif dengan cara bergotong royong melaksanakan program pembangunan fisik desa namun masih ada kekurangan yang rencana perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa Wonosari seperti rencana pembangunan untuk kesenian diantaranya perbaikan gedung kesenian, kemudian pengembangan kesenian jaranan, tari reog, tari remo dan lain sebagainya, pembangunan BUMDes Mart yang pendanaannya akan diambil dari Dana Desa (DD) untuk memenuhi kebutuhan dari semua masyarakat desa maupun masyarakat di luar desa.

Peran pemerintah sebagai stabilisator sudah baik dan sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, hal ini dapat dilihat mulai dalam perumusan atau pembuatan program-program yang melihat dan memprioritaskan yang matang dan sesuai dari kebutuhan dan potensi masyarakat. Bentuk inovasi program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah baik dan inovatif untuk meningkatkan pelayanan dan mensejahterakan terhadap masyarakat Desa Wonosari. Namun terlepas dari keberhasilan program-program yang ada terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program-programnya diantaranya kemampuan pola pikir masyarakat yang masih tradisional, kurangnya kesadaran untuk memajukan desa, masih belum terpenuhinya sasaran yang tepat melalui pembangunan/pemberdayaan masyarakat desa, dan masih terdapatnya pengaruh politik diantaranya lembaga desa dengan BPD sehingga masih dirasa program yang diberikan kurang menyentuh kepada pihak masyarakat itu sendiri.

REFERENCES

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan* (Makassar: Graha Ilmu).
- Bryant and White (1987). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang* (Jakarta: LP3ES), 3–3.
- Daldjoeni and Suyitno (2004). *Perdesaan, Lingkungan dan Pembangunan* (Bandung: PT. Alumnus).
- Fauzi, A. (2013). *Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe* 5, 90–100.
- Henslin, J. M. (2007). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi* (Jakarta: Erlangga).
- Kartasasmita, G. (2001). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo).
- Korten, D. and Sjahrir (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Moelyono, A. M. (1949). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka . (Jakarta: Balai Pustaka).
- Muljana, B. S. (2001). *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: Haji Masagung).
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., and Panuju, D. R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press).
- Supriatna, T. (1996). *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Nimas Multima).
- Thoha, M. (1997). *Prilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Tjokrowinoto, M. (1987). *Politik Pembangunan* (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Ulumiyah, I., Gani, A. J. A., and Mindarti, L. I. (2015). *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, 890–899.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Press. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa).

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2018 Hardianto and Rodyah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

LIST OF TABLES

1	Pembangunan di Desa Wonosari (Sumber : RPJPDes, 2016)	76
---	---	----

TABLE 1 | Pembangunan di Desa Wonosari (Sumber : RPJPDes, 2016)

No	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Keterangan
● A. Pembangunan Fisik			
1	Pavingisasi	Dana Desa, APBDes, Swadaya Masyarakat	Terlaksana
2	BUMDes Mart	Dana Desa	Proses Pelaksanaan
3	HIPPAM	APBDes, Swadaya Masyarakat, ADD	Terlaksana
4	Ponten Umum	APBD Daerah, APBDes, DD	Terlaksana
5	Pasar Desa	APBDes, APBD Daerah, DD, ADD	Terlaksana
6	Pasar Wisata	APBDes, ADD	Proses Pelaksanaan
● B. Pembangunan Non Fisik			
1	Pengenmbangan Kesenian	DD, Swadaya Masyarakat	Terlaksana
2	Posyandu	ADD	Terlaksana
3	Pengobatan Gratis	DAD	Terlaksana
4	Jamkesmas	DAD	Terlaksana
5	Sedekah Bumi / Ruwah Dusun	Swadaya Masyarakat	Terlaksana